



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA – PERUBAHAN) TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA**

Jalan Pengeran Muhamad Km 05 Simpeureum -
Cigasong Telp. (0233)



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Pengeran Muhamad KM. 05 Simpeureum-Cigasong Majalengka Telp (0233) 8292292

(email) : Diskominfo@majalengkakab.go.id. (Website) : <https://diskominfo.majalengkakab.go.id>.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : KU. 10.00.00/Kep. 40 / Diskominfo/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta mengacu berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023, untuk segera menyusun RPD dan bagi kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di susun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika periode Pelaksanaan tahun 2024;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah.....

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahannya;
- 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
- 14 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
- 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);

18. Peraturan Menteri.....

- 18 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 12);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 nomo 2);
- 24 Peraturan daerah Kabupaten majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014 Nomor 1);

27. Peraturan

- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi, Validitas Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah perubahan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kasie dan Jabatan Fungsional Tertentu, agar menjadikan Renja PD ini sebagai pedoman dalam Rencana Kerja perubahan tahun 2024;

Ditetapkan di : Majalengka

Tanggal : Agustus 2024

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



H. GATOT SULAEMAN, AP, M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : KU. 10.00.00/Kep. 40 / Diskominfo/2024

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

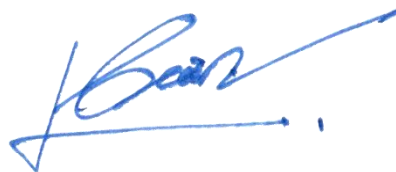
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM PERENCANAAN	KET
1	2	3	4	
1	H. Gatot Sulaeman , AP, M.Si.	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2	H. Wawan Karmawan, S.Pd.M.Pd.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3	Ucu Supriatna, S.Sos.M. Epid.	Kepala Bidang Informatika	Koordinator Bidang Informatika	
4	Teguh Subagja Djajasutisna, SE.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Koordinator Bidang Statistik dan Persandia	
5	Ujat Sudraaat, S.IP. M.Si.	Perencanaan Ahli Muda	Sekretaris	
7	Lilik helaliah, S. Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	
8	Wondi Muhamad Yusuf ST.	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota	
9	Yanyan Mardiana Adnan, SE.	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota	
10	Rommy Asri S. S.Si. M.Si.	Statistisi Ahli Muda	Anggota	

Ditetapkan : Majalengka

Pada tanggal : Agustus 2024

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



H. GATOT SULAEMAN, AP, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Km 5 Simpeureum – Cigasong Majalengka
email : diskominfo@majalengkakab.go.id. Website : [https:// www.diskominfo majalengkakab.go.id](https://www.diskominfo.majalengkakab.go.id).

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : KU. 00.10.00 / 45 / SK.Renja / Diskominfo / 2024

TENTANG

PENETAPAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sinkronisasi, Sinergitas dan berkelanjutan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD Kabupaten Majalengka
- b. bahwa dalam pelaksanaan Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bahan acuan penyusunan Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan RKPD Kabupaten Majalengka yang memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis, Kebijakan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. bahwa dalam Pelaksanaan agar dihasilkan suatu perencanaan sinergis efektif, efesian transparan dan akuntable, maka di pandang perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Nomor 442:
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tetang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lebaran Negara Nomor 4844 ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RO Nomor 4252);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaran Penyiaran Swasta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 No 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Majalengka No 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3780 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Renja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2024

Kedua : Tugas dan wewenang serta tanggungjawab Tim Penetapan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka antara lain :

1. Merencanakan Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
 - a. Menyusun Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
 - b.. Menyusun Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
 - c Penetapan Rencana
 - d Sosialisasi Rencana
 - e Pengendalian pelaksanaan rencana dan Menganalisa/Mengkoreksi Rencana Program dan Kegiatan
 - f Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis
2. Merencanakan Penyusunan Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah
 - a. Menyusun Renja PD sesuai dengan Matrik RPJMD dan Renstra yang telah di susun sesuai tahun berjalan
 - b. Mengumpulkan dan mengkoreksi data dan informasi Capaian indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - c Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun berjalan
 - d Evaluasi Capaian Renja PD

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka
Pada tanggal : Agustus 2024

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



H. GATOT SULAEMAN, AP, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : KU. 00.10.00 / 45 / SK. Renja / Diskominfo / 2024

TENTANG:

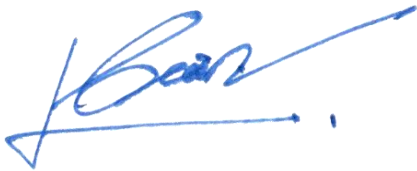
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN RENJA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM PERENCANAAN	KET
1	2	3	4	
1	H. Gatot Sulaeman, AP,M.Si.	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2	H.Wawan Karmawan ,S.Pd.M.Pd.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3	Ucu Supriatna, S.Sos.M. Epid.	Kepala Bidang Informatika	Koordinator Bidang Informatika	
4	Teguh Subagja Djajasutisna, SE.	Kepala Bidang Statistik sektoral dan Persandian	Koordinator Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	
5	Ujat Sudrajat, S.IP,M.Si	Fugsional Tertentu Perencana Ahli Muda	Sekretaris	

Ditetapkan : Majalengka
Pada tanggal : Agustus 2024

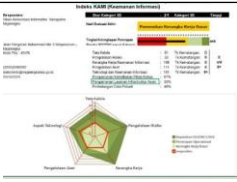
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



H.GATOT SULAEMAN, AP, M. Si.

Lampiran : Surat Keputusan Penetapan Kinerja Utama Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)											
PEMERINTAH KABUPATEN/ NAMA PERANGKAT DAERAH											
TAHUN 2024 - 2026											
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA		
									2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Berdasarkan Undang-undang Nomor ; 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi Publik diperlukan Kualifikasi berdasarkan Tolok Ukur ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi dan Penerapan Keterbukaan Informasi	Non Kumulatif	Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Bidang Komunikasi Publik	80	80	90
2	Meningkatkan Integritas SPBE Perangkat Daerah	Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Indeks Kematangan SPBE	Nilai	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Non Kumulatif	MENPAN- RB	Bidang Informatika	3,00	3,50	3,65
3	Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintahan yang terkoneksi	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Nilai		Non Kumulatif	Badan Siber Dan Sandi Negara	Bidang Statistik dan Persandian	450	475	500
4	Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi bahan penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	Perhitungan IPS = (Jumlah Nilai x Bobot Nilai) / Jumlah SKS	Non Kumulatif	Badan Pusat Statistik	Bidang Statistik dan Persandian	2,8	3,00	3,10

Majalengka, Agustus 2024
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka



H.GATOT SULAEMAN, AP, M. Si.



KATA PENGANTAR

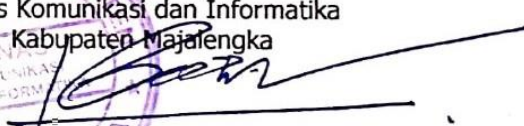


Seraya memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dapat merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 sesuai dengan target waktu yang ditentukan, Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian integral dari program Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka serta merupakan revisi / perubahan, sehubungan dengan dibentuknya Penyertaan Jabatan Pengawasan kepada Jabatan Fungsional Tertentu, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah Kebijakan pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan Persandian satu tahun ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkret. apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan revisi/ perubahan muatan RENSTRA maupun RENJA Perubahan termasuk indikator-indikator kinerjanya, revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran.

RENJA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan RENJA perubahan ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika harus melaksanakan secara transparansi dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*Better Performance*)

Semoga RENJA ini bermanfaat bagi kita semua.

Majalengka , Agustus 2024

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka

H. GATOT SULAEMAN, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 1760528 199412 1 001



DAFTAR ISI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
(RENJA PD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB. I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-4

1.3. Maksud Dan Tujuan..... I-10

1.4. Sistimatika Penulisan..... I-11

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 2-1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 2-6

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah..... 2-17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 2-24

2.5. Tenelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.. 2-25

BAB. III. TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN..... 3-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 3-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD..... 3-2

3.3. Program dan Kegiatan..... 3-6

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 4-1

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 4-1

BAB. V. PENUTUP..... 5-1

5.1. Penutup..... 5-1



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1 Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
- 2 Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
- 3 Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 4 Tabel T-C 32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemegang Kepentingan Tahun 2024
- 5 Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
- 6 Rencana Kerja Program Kerja dan Pendanaan Perar Daerah



DAFTAR TABEL
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



No			Lampiran
1	Tabel TC-29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Tahun Berjalan)	1
2	Tabel TC-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka	2
3	Tabel TC-31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka	3
4	Tabel TC-32	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka	4
5	Tabel TC-33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan Maju tahun 2025 Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Majalengka	4
6	Tabel 6	Rencana Kerja Program Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	4-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi

Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga berisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Pemerintahan Kabupaten Majalengka juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK pemerintah Kabupaten Majalengka juga dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Didalam organisasi pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini

haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen-elemen masyarakat. Hal inilah yang menjadi peran inti dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, sampai ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai *e-Government*, dan diamanatkan dalam bentuk konsep *Smart Province* di Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Konsekuensi perubahan peraturan tersebut diatas, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah teknokratik (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026 dan di disesuaikan dengan perubahan diatas, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 3 (tiga) tahun dan adanya Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2024 – 2026 pelaksanaan untuk tahun 2024 sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam penyusunan Renja ini terutama dalam peletakan pondasi dasar pembangunan teknologi Komunikasi, Informatika Statistik Sektoral dan Persandian di Kabupaten

Majalengka dalam menghadapi isu-isu strategis pembangunan di tingkat Kabupaten. Isu-isu dimaksud di antaranya telah terbangunkan Bandara Internasional Jawa Barat, Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kabupaten Majalengka, Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata Majalengka, Pengembangan Produksi dan Kawasan Agropolitan, perwujudan Desa Mandiri (Desa tangguh) dan tata kelola Pemerintahan yang baik. Isu-isu tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, mengingat teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana penunjang yang sangat penting bagi perwujudan pembangunan terhadap isu-isu strategis di atas.

Di samping itu, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024, bidang Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian yang tertuang

Tujuan Strategis Perangkat Daerah : **Merwujudnya Birokrasi yang Kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima** dengan sasaran 4 (empat) sasaran yaitu :

- 1.Meningkatkan kualitas tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**
- 2.Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik**
- 3.Meningkatkan Keamanan Informasi Publik**
- 4.Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektor di Kabupaten Majalengka**

hal ini juga tercermin dalam 9 Prioritas Pembangunan Unggulan Pembangunan Majalengka diantaranya:

1. Pengentasan Kemiskinan dengan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang jelas
2. Penyediaan Buku Pelajaran Bagi SD, SMP, secara Gratis
3. Pelayanan Kesehatan Gratis berkala dan tuntas
4. Pemberian Insentif Guru ngaji, Imam Masjid dan Bantuan Sarana Keagamaan

5. Pembangunan Jembatan di Daerah Pasir Ayu Kecamatan Sindang
6. Pelayanan KTP gratis secara Mobile
7. Pelayanan perijinan secara mudah, cepat dan transparan
8. Evaluasi pajak bumi dan bangunan
9. Peningkatan Tunjangan Kinerja ASN

Sebagaimana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Visi dan Misi Kabupaten Majalengka, maka program dan kegiatan daerah harus bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah kebijakan Organisasi. dukungan teknologi informasi Pemerintah Daerah dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan Organisasi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu unsur Dinas berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informatika demi terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governace*).

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor : 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RO Nomor 4252);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaran Penyiaran Swasta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 16. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

21. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita lebar Indonesia;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 2008 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 tanggal 18 Juni 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3780 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja perubahan PD (Renja Perubahan PD) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

3. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
5. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-PERUBAHAN) tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum. Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-PERUBAHAN) Tahun 2024

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SEBELUMNYA

Menguraikan tentang Evaluasi Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB.III. TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN

Mengemukakan telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi tentang arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran OPD merumuskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas Pokok dan Fungsi, serta Program dan Kegiatan.

BAB. IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.



BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika menurut DPPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp.5.393.998.809 Dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 5 program 12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan

Sedangkan Alokasi Anggaran 2022 yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika yang terealisasi adalah sebesar Rp. 5.213.660.953 dengan capaian target kinerja 96.66 % yang terdiri dari 5 Program dan 12 kegiatan , 36 Sub Kegiatan tidak dapat di realisasikan sebanyak 5 Sub Kegiatan hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2019-2023 berdasarkan Dokumen Perubahan Renstra mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 serta perubahan Permendagri nomor 050- 3780 serta perubahan Permendagri Nomor 050. 8988 tahun 2021 sehingga core business Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 1 (**Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017**) dibawah (terlampir)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 Nomor : DPPA/B.2/2.16.2.20.2.21.1.00/001/2022 Tanggal 03 Desember 2022 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka memiliki pagu anggaran belanja langsung Rp. **5.393.998.809**

Berikut ini uraian capaian target kinerja bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, maka diperlukan strategi langkah pencapaian sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. di antara langkah strategi dinas yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Peningkatan perencanaan, kinerja dan kapasitas sumberdaya manusia di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral melalui berbagai program pendidikan , Pelatihan,saresehan, Workshop, dan Bimtek.
2. Peningkatkan sarana dan Prasarana Jaringan Aplikasi dan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
3. Optimalisasi kajian penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan upaya pemenuhan sarana pendukung berbasis teknologi informasi.
4. Optimalisasi upaya perwujudan sistem pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika yang aplikatif, efisien, akuntabel, dan humanis, serta peningkatan upaya penegakan peraturan perundangan.
5. Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian

Berangkat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka untuk rencana kerja Perubahan tahun 2024 telah disusun berdasarkan Tujuan, sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai berikut :
Merwujudnya Birokrasi yang Kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1) | Sasaran | : Meningkatkan kualitas tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| | Indikator | : Indeks SPBE |

- Sasaran

Target : Nilai 2,85
- 2)

Sasaran : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Indikator : Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran

Target : Nilai 80
- 3)

Sasaran : Meningkatkan Keamanan Informasi Publik

Indikator : Indeks Keamanan Informasi Publik

Sasaran

Target : Nilai 450
- 4)

Sasaran : Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Kabupaten Majalengka

Indikator : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Sasaran

Target : Nilai 2,3

1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari Sasaran Staregi dan Indikator Kinerja maka dapat di jabarkan menjadi 5 Program , 12 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan yang dengan rincian sebagai berikut:

(I) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khitasar Realisasi Kinerja SKPD

4 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah

2

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

2-3

- Capaian Target kinerja Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2023 dengan Taget 100 % Realisasi Capaian Kinerja Program sebesar 17 % sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 17 % dari 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

1	Kegiatan	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
	Sub Kegiatan	:	1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2 Pelayanan Informasi Publik 3 Layanan Hubungan Media 4 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas

Capaian Target kinerja Pada Program Informasi dan Komunikasi Publik sampai dengan akhir bulan Maret 2023 dengan Taget 100 % Realisasi Capaian Kinerja Program sebesar 6 % sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 3 % dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan.

(IV) Program Aplikasi Informatika

- 1

Kegiatan

:

Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat daan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan

:

1.

Penyelenggaraan Sistem,Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 2

Kegiatan

:

Pengelolaan e- Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan

:

1

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

2

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.

3

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian Target kinerja Pada Program Aplikasi Informatika sampai dengan bulan Maret 2023 dengan Taget 100 % Realisasi Capaian Kinerja Program sebesar 36 % sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 29 % dari 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan

(IV) Pogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1

Kegiatan

:

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan

:

1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan.Analisis dan Desiminasi data Statistik Sektoral

2

Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik yang terintegrasi

3

Membangun Metadata Statistik Sektoral

4

Pengembangan Infrastruktur

Capaian Target kinerja Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sampai dengan akhir bulan Maret 2023 dengan Taget 100 % Realisasi Capaian Kinerja Program sekitar 19 % sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 5 % dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan

(V) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 1

Kegiatan

:

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengemanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan

:

1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota

Capaian Target kinerja Pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi sampai dengan akhir bulan Maret 2023 dengan Realisasi Capaian Kinerja Program sekitar 1 % sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 9 % dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika masih mengacu pada analisis kinerja pelayanan di bidang Komunikasi informasi Statistik Sektoral Berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Perubahan urusan Ketahanan Pangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dari Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar belum diikuti dengan perubahan SPM. SPM Bidang Komunikasi Informasi Statistik berdasarkan rencana tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) standar umum yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika Statistik Sektoral dan Persandian
- Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan asli Daerah berupa retribusi jasa umum pengendalian Menara Telekomunikasi
- Mengatur, mengendalikan, pengawasan di bidang komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan Persandian
- Melaksanakan koordinasi antar lembaga teknis pusat maupun daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang dijabarkan dengan peraturan Daerah Nomor 69 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, tugas pokok Dinas adalah : **Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika dan bidang Statistik sektoral dan Persandian** yang mempunyai tugas, fungsi, kewenangan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang dibentuk berdasarkan Perda 99 Tahun 2021 adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan;
2. Merumuskan permasalahan;
3. Inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
4. Inventarisasi dan identifikasi data Primer;
5. Mengolah data dan informasi;
6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
7. Menganalisis data dan informasi;
8. Menyajikan data dan informasi;
9. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
10. Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan;
11. Mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi di bidang Kebijakan Teknis Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral Kabupaten Majalengka adalah:

1. Keakuratan identifikasi permasalahan ;
2. Keakuratan jenis permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
3. Keakuratan laporan inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
4. Keakuratan laporan inventarisasi dan identifikasi data Primer;
5. Keakuratan data dan informasi dalam rangka pengolahan

- data dan informasi;
6. Kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan data;
 7. Keakuratan laporan hasil Analisis data dan informasi;
 8. Keakuratan data dan informasi yang disajikan;
 9. kelancaran pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan rencana;
 10. Kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi rencana;
 11. Kelancaran kegiatan pengolahan data dan informasi evaluasi rencana pembangunan tahunan;
 12. Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

3. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi, Tanggungjawab serta Kewenangan Kepala Dinas di bidang Kebijakan Teknis Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektorial Kabupaten Majalengka adalah:

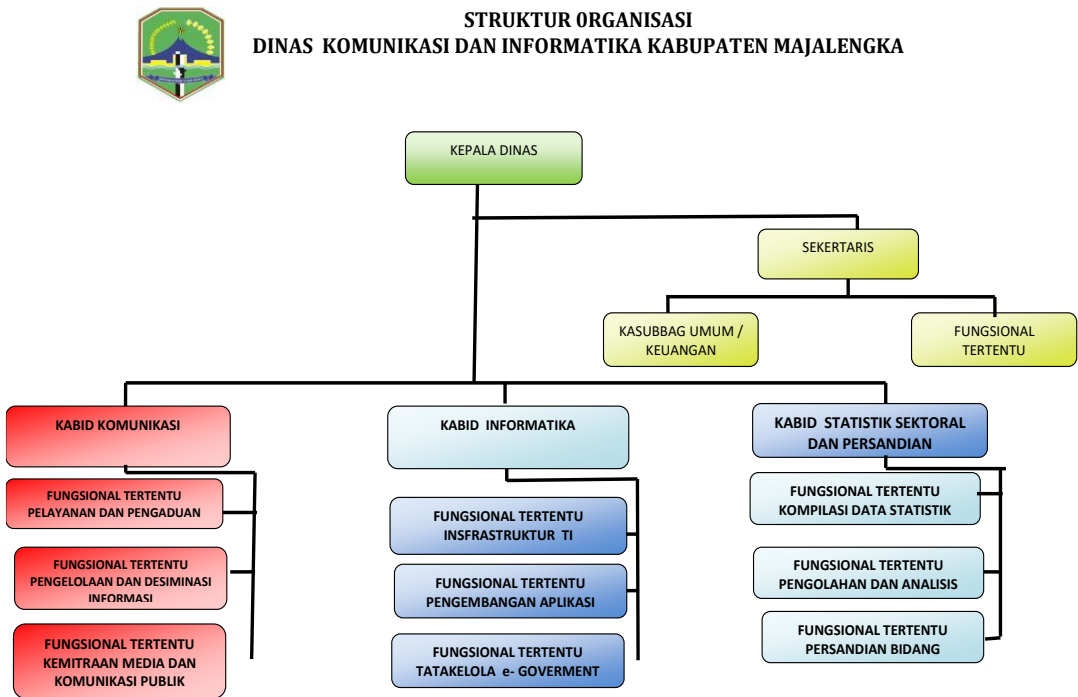
- 1 Meminta data untuk melaksanakan identifikasi permasalahan bidang perencanaan;
- 2 Meminta data untuk menyusun rumusan masalah bidang perencanaan;
- 3 Meminta data untuk menginventarisir dan mengidentifikasi data sekunder bidang perencanaan;
- 4 Meminta data untuk menginventarisir dan mengidentifikasi data Primer bidang perencanaan;
- 5 Meminta data untuk bahan pengolahan data dan informasi bidang perencanaan;
- 6 Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan data bidang perencanaan;
- 7 Meminta data untuk melaksanakan kegiatan analisis data dan informasi bidang perencanaan;
- 8 Memberi data dan informasi bidang perencanaan;
- 9 Memonitor persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
- 1 Mengawasi persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan;
11. Meminta data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Susunan Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perda nomor Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 061 / Kep.783-Org/2020 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, terdiri atas seorang Kepala Dinas (eselon II) sekretaris Dinas (eselon III) 3 Orang Kepala Bidang (eselon III /b) 2 orang Kasubag , dan 9 Orang Pejabat Fungsional Tertentu (setara eselon IV) dengan Struktur Sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Pejabat Fungsional Tertentu Perencana ahli Muda
3. Bidang Komunikasi membawahkan :
 - a) Pejabat Fungsional Tertentu Pelayanan Informasi dan Pengaduan Informasi Publik
 - b) Pejabat Fungsional Tertentu Pengelolaan dan Diseminasi Informasi
 - c) Pejabat Fungsional Tertentu Kemitraan Media dan Komunikasi Publik
4. Bidang Informatika Membawahkan :
 - a) Pejabat Fungsional Tertentu Infrastruktur Teknologi Informasi
 - b) Pejabat Fungsional Tertentu Tata Kelola E-Goverment
 - c) Pejabat Fungsional Tertentu Pengembangan Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian membawahkan:
 - a) Pejabat Fungsional Tertentu Statiktisi Ahli Muda Kompilasi Data
 - b) Pejabat Fungsional Tertentu Statiktisi Ahli Muda Pengolahan dan Analisis Data
 - c) Seksi Persandian bidang Statistik Sektoral

(lihat tabel Struktur Organisasi sebagaimana
Daftar di bawah ini :



Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Publik serta Keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada **Tabel 2 (Tabel.T-C.30) berikut ini :**

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan

distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, ada 2 tugas pokok urusan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi, adalah : menyelenggarakan pelayanan urusan Wajib pemerintahan Non Pelayanan Dasar 1 (Satu) dibidang Komunikasi dan informatika dan 2 (dua) urusan di bidang Statistik Sektoral dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah;
3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kab /Kota;
4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;
6. Layanan Akses Internet dan Intranet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan pemerintahan;
9. Terselenggaranya Ekosistem TIK ***Smart City***;
10. Penyelenggaraan ***Government Chief Informasi Officer (GCIO)***;
11. Pengembangan Sumberdaya TIK pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi bidang urusan Statistik dan Persandian adalah :

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral.
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan infrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.

5. Pengamanan data dan Informasi Pemerintah Daerah

Karakteristik dan kebutuhan daerah di evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat / Daerah. bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Jawa Barat seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Majalengka dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
5. Penyelarasan data Statistik Sektoral dan Persandian;
6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka telah diinisiasi dan diupayakan dalam Kemitra-kerjaan dalam Pelaksana Program Kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan

Persandian serta koordinasi dan kerjasama pemerintah Pusat dan Provinsi masih perlu ditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada satu rel yang sama. sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain : berikut gambaran pemetaan pemasalahan untuk penentuan Prioritas dan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana ***terlampir***

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka						
Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD	
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)		
1	2	3	4	5	6	
1.	Minimnya Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan SDM di bidang Layanan Komunikasi dan Informatika yang memadai	Belum Optimalnya sarana dan Fasilitas Infrastruktur Jaringan Komunikasi serta SDM yang mendukung terdapat Layanan Informasi Publik	Indeks SPBE	Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika	Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Majalengka yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;	Kurangnya Sarana Infrastruktur Komunikasi Informatika yang mendukung terhadap Peningkatan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan berbasis Elektronik
2.	Belum Meratanya Kualitas Layanan Komunikasi sampai ke Pedesaan	Sebagian besar Masyarakat telah memahami akan Layanan Informasi yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kewengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik melalui Media Cetak dan Elektronik	Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;	Masyarakat di pedesaan belum sepenuhnya memahami akan Pentingn Informasi Publik yang disediakan Pemerintahan
3	Belum tersusunnya Regulasi Teknis dan Standar Kerja	Belum Optimalnya Pengelolaan Data Base Statistik Setiap OPD	Indeks Pembangunan Statistik	Berkewajiban mendukung dan mewujudkan Satu Data Indonesia	Eksistensi Perangkat Daerah terhadap data Statistik belum sepenuhnya Pemahani akan Pentingnya Data Statistik	Literasi <i>Data Driven Government</i> (budaya pengambilan
4	Ketersediaan data masih rendah	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Kurangnya dukungan SDM yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
5	Integrasi data belum terbangun	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Sumberdaya eksisting berupa perangkat lunak dan perangkat keras sangat terbatas.
6	Data yang sesuai standar sangat terbatas dan Penggunaan Data Dalam Penentuan Program belum Optimal	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Kurangnya dukungan anggaran
7	Data geospasial yang sesuai dengan standar sangat terbatas	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Kurangnya dukungan SDM yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan
8	Belum terbentuk simpul jaringan informasi geospasial	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Sumberdaya eksisting berupa perangkat lunak dan perangkat keras sangat terbatas.
9	Msih rendahnya Ketersediaan Data Geopersial serta belum tersedia geoportal	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Kurangnya dukungan anggaran
10	Regulasi teknis dan standar kerja belum tersusun	Belum sadar Akan Pentingnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Berkewajiban mendukung jaminan kemandan informasi SPBE	Dipengaruhi oleh Tingkat awarere ness Masyarakat Terhadap Keamanan Informasi	Literasi kemandan informasi pribadi dan publik masih rendah
11	Belum terlaksananya ITSA (<i>Information Technology Security</i>)	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Kurangnya dukungan SDM yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan (eksisting 1 orang)
12	Belum terbangunnya <i>Security Operation Center</i> (SOC)	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Sumberdaya eksisting berupa perangkat lunak dan perangkat keras sangat terbatas.
13	Belum Terbentuk CSIRT (<i>Computer Security Insiden Response Team</i>)	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Kurangnya dukungan anggaran
14	Belum dapat melaksanakan kontra	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Kurangnya dukungan anggaran
15	Belum dapat melaksanakan <i>jamming</i>	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Sda
16	Pemanafaat jaring komunikasi sandi sangat belum	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Sda
17	Belum tersedia VPN	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Sda
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA		Sda	Indeks KAMI	Sda	Sa	2-14 Sda
18	Belum terdapat office dengan fasilitas kemandan informasi belum	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sa	Sda

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Isu-isu strategis yang berkembang sangat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, baik dalam pemenuhan SPM maupun MDGS, maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Penentuan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu OPD dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai sektor pembangunan.
2. Penggalian sumber dana untuk menunjang kelangsungan suatu program dan kegiatan.
3. Penataan manajemen dan administrasi harus benar- benar mencerminkan sikap terbuka terhadap aspirasi yang muncul dari masyarakat dan dapat merealisasikannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya aparatur ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat di bidang perekonomian.
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang perencanaan program dan kegiatan.
7. Optimalisasi sarana dan prasana serta fasilitas pendukung untuk menunjang Program dan Kegiatan Strategis

4. Tantangan dan Peluang Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan OPD

Sebuah organisasi pemerintahan yang ditata dengan manajemen mengacu kepada lingkungan kekinian dan masa depan secara terorganisir untuk pencapaian target. Secara aplikatif, manajemen organisasi saat ini telah berkembang sangat maju, sehingga perlu manajemen yang mengarah kepada kepentingan umum (*Publik Service*) yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan eksternal (*Global System*).

a. Kekuatan (Strengths)

- Adanya legalitas Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- Tersedianya Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika
- Tersedianya Radika FM
- Tersedianya Sarana Penyebaran informasi Publik melalui media massa
- Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Terbentuknya SDM Komunikasi di OPD, Kecamatan serta Desa

b. Kelemahan (Weaknesses)

- Profesionalisme Kinerja Pegawai yang kurang Optimal
- Aksesibilitas sarana Komunikasi belum terjangkau keseluruhan
- Kurang nya animo masyarakat akan informasi melalui radio
- Belum terpenuhinya penyebaran informasi media massa diterima oleh masyarakat
- Masih belum optimal pengkoordinasi Pembentukan KIM
- Kualitas SDM Komunikasi belum optimal

c. Peluang (Opportunities)

- Kebijakan Pemerintah akan organisasi dinas Komunikasi dan Informatika menunjang
- Adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika
- Kualitas sarana dan fasilitas pendukung Teknologi Penyiaran akan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan jaman
- Tuntutan Pemerintah terhadap Masyarakat menunjang peningkatan akan komunikasi dan informasi media massa
- Kebutuhan Organisasi yang semakin meningkat
- Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

d. Ancaman (Threats)

- Keterbatasan wewenang Pemerintah Daerah
- Kurangnya Koordinasi dalam menyusun Program
- Perkembangan globalisasi, Iptek, arus transformasi dan Komunikasi sangat pesat.
- Belum dilaksanakannya tata kelola layanan informasi yang efektif
- Semakin banyaknya organisasi masyarakat yang bermunculan
- Masih rendahnya komitmen pengelolaan sumber daya Komunikasi dan informasi

5. Isu Isu Strategis dalam Perumusan Program / Kegiatan**1. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah perkotaan dicirikan dengan lebih baiknya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan semakin tinggi. dengan kondisi tersebut, maka tingkat kedewasaan dan tuntutan masyarakat terhadap informasi semakin besar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan kota / Kabupaten .

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan

kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan e-government

Kabupaten Majalengka mempunyai posisi yang strategis, karena secara geografis terletak pada wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya. Saat ini warga Kabupaten Majalengka telah memasuki budaya perkotaan yang dicirikan dengan tingkat pendidikan yang baik, daya kritis yang tinggi, mobilitas yang tinggi, membutuhkan kualitas pelayanan yang baik, efisiensi dan tidak menyukai sikap birokrasi yang lamban.

Kondisi tersebut diatas harus mampu dijawab dengan postur, profil dan kinerja yang profesional dari aparatur Pemerintah Kabupaten Majalengka. Aparatur pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan pimpinan daerah menjadi pimpinan dan bawahan diseluruh lembaga, dinas, kantor dan organisasi perangkat daerah yang ada.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, maka PNS akan atau sedang menduduki posisi jabatan struktural harus dapat berperan aktif menjalankan fungsi birokrasi yang di amanahkan, sesuai dengan peraturan peundangan yang berlaku.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi

- kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - b. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan

- c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - b. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
5. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Majalengka terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;
 1. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka;
 2. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
 3. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
 4. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
 5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Jawa Barat Tahun 2009-2029;
2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka;
3. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
4. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
5. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
6. Hasil-hasil dialog;
7. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;
8. Rencana Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati;
9. Rencana Pembangunan Jalan TOL CISUMDAWU dan TOL CIKAPALI;
10. Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Cirebon.

Pertimbangan rencana baru yang akan berkaitan dengan Struktur ruang adalah:

- a. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka.
- b. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Majalengka
- c. Pembangunan Jalan Lingkar Kadipaten
- d. Pembangunan Jalan tembus Majalengka – Lemahsugih.
- e. Pengembangan Luas Ibu Kota Kabupaten Majalengka (Kec. Majalengka, Cigasong, dan Panyingkiran)
- f. Pengembangan pemanfaatan Waduk Jati Gede.
- g. Pengembangan Kawitwangi (Kawasan Wisata Sindangwangi).
- h. Pengembangan wisata situs Prabu Siliwangi.
- i. Pengaturan tentang kebencanaan.

2. Penentuan Terhadap Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Majalengka yang berada di wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial,

budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi; Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

➤ **Keterbukaan Informasi Publik**

Informasi Publik memiliki makna: segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan /instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain

diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

➤ **Komitmen terhadap e-development**

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Majalengka memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparaturnya pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian

terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan RKPD. RKPD perubahan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD 2019-2023 (revisi) dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan anggaran tahun 2023 dan dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam ataupun mengukur Kinerja yang sudah tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Komunikasi dan Komunikasi Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang Komunikasi informatika Statistik sektoral dan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka **Pada Tabel 3 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)** ini, diperlukan:

- a. Perbaiki indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;

- b. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- c. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kab/Kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika .

Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;
3. dan Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam bentuk seperti di bawah ini : Majalengka **Pada Tabel 4 (Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**



BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika menurut DPPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp.5.393.998.809 Dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 5 program 12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan

Sedangkan Alokasi Anggaran 2022 yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika yang terealisasi adalah sebesar Rp. 5.213.660.953 dengan capaian target kinerja 96.66 % yang terdiri dari 5 Program dan 12 kegiatan , 36 Sub Kegiatan tidak dapat di realisasikan sebanyak 5 Sub Kegiatan hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2019-2023 berdasarkan Dokumen Perubahan Renstra mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 serta perubahan Permendagri nomor 050- 3780 serta perubahan Permendagri Nomor 050. 8988 tahun 2021 sehingga core business Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 1 (**Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017**) dibawah (terlampir)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 Nomor : DPPA/B.2/2.16.2.20.2.21.1.00/001/2022 Tanggal 03 Desember 2022 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka memiliki pagu anggaran belanja langsung Rp. **5.393.998.809**

Berikut ini uraian capaian target kinerja bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, maka diperlukan strategi langkah pencapaian sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. di antara langkah strategi dinas yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Peningkatan perencanaan, kinerja dan kapasitas sumberdaya manusia di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral melalui berbagai program pendidikan , Pelatihan,saresehan, Workshop, dan Bimtek.
2. Peningkatkan sarana dan Prasarana Jaringan Aplikasi dan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
3. Optimalisasi kajian penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan upaya pemenuhan sarana pendukung berbasis teknologi informasi.
4. Optimalisasi upaya perwujudan sistem pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika yang aplikatif, efisien, akuntabel, dan humanis, serta peningkatan upaya penegakan peraturan perundangan.
5. Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian

Berangkat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka untuk rencana kerja Perubahan tahun 2024 telah disusun berdasarkan Tujuan, sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai berikut :
Merwujudnya Birokrasi yang Kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1) | Sasaran | : Meningkatkan kualitas tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| | Indikator | : Indeks SPBE |

- Sasaran

Target : Nilai 2,85
- 2)

Sasaran : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Indikator : Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran

Target : Nilai 80
- 3)

Sasaran : Meningkatkan Keamanan Informasi Publik

Indikator : Indeks Keamanan Informasi Publik

Sasaran

Target : Nilai 450
- 4)

Sasaran : Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Kabupaten Majalengka

Indikator : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Sasaran

Target : Nilai 2,3

1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari Sasaran Staregi dan Indikator Kinerja maka dapat di jabarkan menjadi 5 Program , 12 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan yang dengan rincian sebagai berikut:

(I) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khitasar Realisasi Kinerja SKPD

4 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah

2

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

2-3

2.

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/
3.

triwulanan/semesteran
- 3

Kegiatan

:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan

:
1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4

Kegiatan

:

Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan

:
1.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4

Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan
- 5

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5

Kegiatan

:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan

:
- 1

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 2

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6

Kegiatan

:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan

:
- 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian Target kinerja Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2023 dengan Taget 100 % Realisasi Capaian Kinerja Program sebesar 17 % sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 17 % dari 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

(II) Program Informasi dan Komunikasi Publik

- 1

Kegiatan

:

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan

:
- 1

Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 2

Pelayanan Informasi Publik
- 3

Layanan Hubungan Media
- 4

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- 5

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas

Capaian Target kinerja Pada Program Informasi dan Komunikasi Publik sampai dengan akhir bulan Maret 2023 dengan Taget 100 % Realisasi Capaian Kinerja Program sebesar 6 % sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 3 % dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan.

(IV) Program Aplikasi Informatika

- 1

Kegiatan

:

Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat daan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan

:

1.

Penyelenggaraan Sistem,Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 2

Kegiatan

:

Pengelolaan e- Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan

:

1

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

2

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.

3

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian Target kinerja Pada Program Aplikasi Informatika sampai dengan bulan Maret 2023 dengan Taget 100 % Realisasi Capaian Kinerja Program sebesar 36 % sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 29 % dari 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan

(IV) Pogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1

Kegiatan

:

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan

:

1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan.Analisis dan Desiminasi data Statistik Sektoral

2

Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik yang terintegrasi

3

Membangun Metadata Statistik Sektoral

4

Pengembangan Infrastruktur

Capaian Target kinerja Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sampai dengan akhir bulan Maret 2023 dengan Taget 100 % Realisasi Capaian Kinerja Program sekitar 19 % sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 5 % dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan

(V) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 1

Kegiatan

:

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengemanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan

:

1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota

Capaian Target kinerja Pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi sampai dengan akhir bulan Maret 2023 dengan Realisasi Capaian Kinerja Program sekitar 1 % sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 9 % dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika masih mengacu pada analisis kinerja pelayanan di bidang Komunikasi informasi Statistik Sektoral Berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Perubahan urusan Ketahanan Pangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dari Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar belum diikuti dengan perubahan SPM. SPM Bidang Komunikasi Informasi Statistik berdasarkan rencana tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) standar umum yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika Statistik Sektoral dan Persandian
- Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan asli Daerah berupa retribusi jasa umum pengendalian Menara Telekomunikasi
- Mengatur, mengendalikan, pengawasan di bidang komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan Persandian
- Melaksanakan koordinasi antar lembaga teknis pusat maupun daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang dijabarkan dengan peraturan Daerah Nomor 69 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, tugas pokok Dinas adalah : **Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika dan bidang Statistik sektoral dan Persandian** yang mempunyai tugas, fungsi, kewenangan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang dibentuk berdasarkan Perda 99 Tahun 2021 adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan;
2. Merumuskan permasalahan;
3. Inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
4. Inventarisasi dan identifikasi data Primer;
5. Mengolah data dan informasi;
6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
7. Menganalisis data dan informasi;
8. Menyajikan data dan informasi;
9. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
10. Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan;
11. Mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi di bidang Kebijakan Teknis Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral Kabupaten Majalengka adalah:

1. Keakuratan identifikasi permasalahan ;
2. Keakuratan jenis permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
3. Keakuratan laporan inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
4. Keakuratan laporan inventarisasi dan identifikasi data Primer;
5. Keakuratan data dan informasi dalam rangka pengolahan

- data dan informasi;
6. Kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan data;
 7. Keakuratan laporan hasil Analisis data dan informasi;
 8. Keakuratan data dan informasi yang disajikan;
 9. kelancaran pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan rencana;
 10. Kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi rencana;
 11. Kelancaran kegiatan pengolahan data dan informasi evaluasi rencana pembangunan tahunan;
 12. Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

3. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi, Tanggungjawab serta Kewenangan Kepala Dinas di bidang Kebijakan Teknis Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektorial Kabupaten Majalengka adalah:

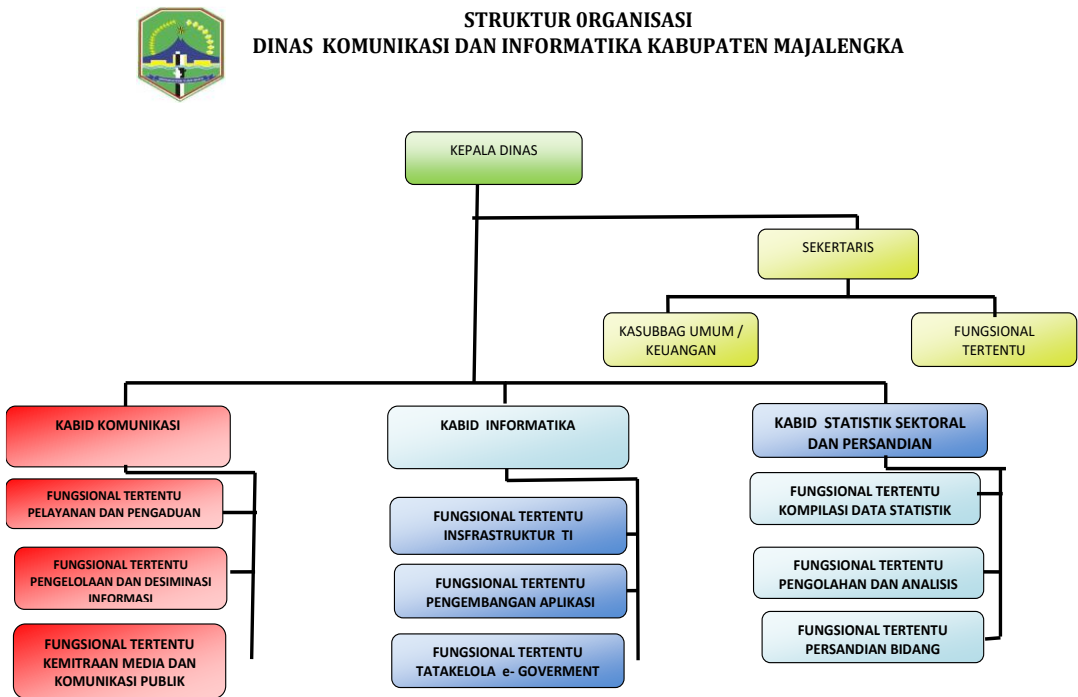
- 1 Meminta data untuk melaksanakan identifikasi permasalahan bidang perencanaan;
- 2 Meminta data untuk menyusun rumusan masalah bidang perencanaan;
- 3 Meminta data untuk menginventarisir dan mengidentifikasi data sekunder bidang perencanaan;
- 4 Meminta data untuk menginventarisir dan mengidentifikasi data Primer bidang perencanaan;
- 5 Meminta data untuk bahan pengolahan data dan informasi bidang perencanaan;
- 6 Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan data bidang perencanaan;
- 7 Meminta data untuk melaksanakan kegiatan analisis data dan informasi bidang perencanaan;
- 8 Memberi data dan informasi bidang perencanaan;
- 9 Memonitor persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
- 1 Mengawasi persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan;
11. Meminta data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Susunan Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perda nomor Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 061 / Kep.783-Org/2020 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, terdiri atas seorang Kepala Dinas (eselon II) sekretaris Dinas (eselon III) 3 Orang Kepala Bidang (eselon III /b) 2 orang Kasubag , dan 9 Orang Pejabat Fungsional Tertentu (setara eselon IV) dengan Struktur Sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Pejabat Fungsional Tertentu Perencana ahli Muda
3. Bidang Komunikasi membawahkan :
 - a) Pejabat Fungsional Tertentu Pelayanan Informasi dan Pengaduan Informasi Publik
 - b) Pejabat Fungsional Tertentu Pengelolaan dan Diseminasi Informasi
 - c) Pejabat Fungsional Tertentu Kemitraan Media dan Komunikasi Publik
4. Bidang Informatika Membawahkan :
 - a) Pejabat Fungsional Tertentu Infrastruktur Teknologi Informasi
 - b) Pejabat Fungsional Tertentu Tata Kelola E-Goverment
 - c) Pejabat Fungsional Tertentu Pengembangan Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian membawahkan:
 - a) Pejabat Fungsional Tertentu Statiktisi Ahli Muda Kompilasi Data
 - b) Pejabat Fungsional Tertentu Statiktisi Ahli Muda Pengolahan dan Analisis Data
 - c) Seksi Persandian bidang Statistik Sektoral

(lihat tabel Struktur Organisasi sebagaimana
Daftar di bawah ini :



Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Publik serta Keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada **Tabel 2 (Tabel.T-C.30) berikut ini :**

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan

distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, ada 2 tugas pokok urusan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi, adalah : menyelenggarakan pelayanan urusan Wajib pemerintahan Non Pelayanan Dasar 1 (Satu) dibidang Komunikasi dan informatika dan 2 (dua) urusan di bidang Statistik Sektoral dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah;
3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kab /Kota;
4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;
6. Layanan Akses Internet dan Intranet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan pemerintahan;
9. Terselenggaranya Ekosistem TIK ***Smart City***;
10. Penyelenggaraan ***Government Chief Informasi Officer (GCIO)***;
11. Pengembangan Sumberdaya TIK pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi bidang urusan Statistik dan Persandian adalah :

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral.
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan infrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.

5. Pengamanan data dan Informasi Pemerintah Daerah

Karakteristik dan kebutuhan daerah di evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat / Daerah. bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Jawa Barat seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Majalengka dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
5. Penyelarasan data Statistik Sektoral dan Persandian;
6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka telah diinisiasi dan diupayakan dalam Kemitra-kerjaan dalam Pelaksana Program Kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Sektoral dan

Persandian serta koordinasi dan kerjasama pemerintah Pusat dan Provinsi masih perlu ditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada satu rel yang sama. sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain : berikut gambaran pemetaan pemasalahan untuk penentuan Prioritas dan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana ***terlampir***

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka						
Aspek Kajian		Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
1		2	3	4	5	6
1.	Minimnya Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan SDM di bidang Layanan Komunikasi dan Informatika yang memadai	Belum Optimalnya sarana dan Fasilitas Infrastruktur Jaringan Komunikasi serta SDM yang mendukung terdapat Layanan Informasi Publik	Indeks SPBE	Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika	Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Majalengka yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;	Kurangnya Sarana Infrastruktur Komunikasi Informatika yang mendukung terhadap Peningkatan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan berbasis Elektronik
2.	Belum Meratanya Kualitas Layanan Komunikasi sampai ke Pedesaan	Sebagian besar Masyarakat telah memahami akan Layanan Informasi yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kewengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik melalui Media Cetak dan Elektronik	Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;	Masyarakat di pedesaan belum sepenuhnya memahami akan Pentingn Informasi Publik yang disediakan Pemerintahan
3	Belum tersusunnya Regulasi Teknis dan Standar Kerja	Belum Optimalnya Pengelolaan Data Base Statistik Setiap OPD	Indeks Pembangunan Statistik	Berkewajiban mendukung dan mewujudkan Satu Data Indonesia	Eksistensi Perangkat Daerah terhadap data Statistik belum sepenuhnya Pemahani akan Pentingnya Data Statistik	Literasi <i>Data Driven Government</i> (budaya pengambilan
4	Ketersediaan data masih rendah	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Kurangnya dukungan SDM yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
5	Integrasi data belum terbangun	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Sumberdaya eksisting berupa perangkat lunak dan perangkat keras sangat terbatas.
6	Data yang sesuai standar sangat terbatas dan Penggunaan Data Dalam Penentuan Program belum Optimal	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Kurangnya dukungan anggaran
7	Data geospasial yang sesuai dengan standar sangat terbatas	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Kurangnya dukungan SDM yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan
8	Belum terbentuk simpul jaringan informasi geospasial	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Sumberdaya eksisting berupa perangkat lunak dan perangkat keras sangat terbatas.
9	Msih rendahnya Ketersediaan Data Geopersial serta belum tersedia geoportal	Sda	Indeks Pembangunan Statistik	Sda	Sda	Kurangnya dukungan anggaran
10	Regulasi teknis dan standar kerja belum tersusun	Belum sadar Akan Pentingnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Berkewajiban mendukung jaminan kemandan informasi SPBE	Dipengaruhi oleh Tingkat awareness Masyarakat Terhadap Keamanan Informasi	Literasi kemandan informasi pribadi dan publik masih rendah
11	Belum terlaksananya ITSA (<i>Information Technology Security</i>)	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Kurangnya dukungan SDM yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan (eksisting 1 orang)
12	Belum terbangunnya <i>Security Operation Center</i> (SOC)	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Sumberdaya eksisting berupa perangkat lunak dan perangkat keras sangat terbatas.
13	Belum Terbentuk CSIRT (<i>Computer Security Insiden Response Team</i>)	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Kurangnya dukungan anggaran
14	Belum dapat melaksanakan kontra	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Kurangnya dukungan anggaran
15	Belum dapat melaksanakan <i>jamming</i>	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Sda
16	Pemanafaat jaring komunikasi sandi sangat belum	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Sda
17	Belum tersedia VPN	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sda	Sda
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA		Sda	Indeks KAMI	Sda	Sa	2-14 Sda
18	Belum terdapat office dengan fasilitas kemandan informasi belum	Sda	Indeks KAMI	Sda	Sa	Sda

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Isu-isu strategis yang berkembang sangat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, baik dalam pemenuhan SPM maupun MDGS, maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Penentuan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu OPD dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai sektor pembangunan.
2. Penggalan sumber dana untuk menunjang kelangsungan suatu program dan kegiatan.
3. Penataan manajemen dan administrasi harus benar- benar mencerminkan sikap terbuka terhadap aspirasi yang muncul dari masyarakat dan dapat merealisasikannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya aparatur ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat di bidang perekonomian.
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang perencanaan program dan kegiatan.
7. Optimalisasi sarana dan prasana serta fasilitas pendukung untuk menunjang Program dan Kegiatan Strategis

4. Tantangan dan Peluang Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan OPD

Sebuah organisasi pemerintahan yang ditata dengan manajemen mengacu kepada lingkungan kekinian dan masa depan secara terorganisir untuk pencapaian target. Secara aplikatif, manajemen organisasi saat ini telah berkembang sangat maju, sehingga perlu manajemen yang mengarah kepada kepentingan umum (*Publik Service*) yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan eksternal (*Global System*).

a. Kekuatan (Strengths)

- Adanya legalitas Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- Tersedianya Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika
- Tersedianya Radika FM
- Tersedianya Sarana Penyebaran informasi Publik melalui media massa
- Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Terbentuknya SDM Komunikasi di OPD, Kecamatan serta Desa

b. Kelemahan (Weaknesses)

- Profesionalisme Kinerja Pegawai yang kurang Optimal
- Aksesibilitas sarana Komunikasi belum terjangkau keseluruhan
- Kurang nya animo masyarakat akan informasi melalui radio
- Belum terpenuhinya penyebaran informasi media massa diterima oleh masyarakat
- Masih belum optimal pengkoordinasi Pembentukan KIM
- Kualitas SDM Komunikasi belum optimal

c. Peluang (Opportunities)

- Kebijakan Pemerintah akan organisasi dinas Komunikasi dan Informatika menunjang
- Adanya Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika
- Kualitas sarana dan fasilitas pendukung Teknologi Penyiaran akan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan jaman
- Tuntutan Pemerintah terhadap Masyarakat menunjang peningkatan akan komunikasi dan informasi media massa
- Kebutuhan Organisasi yang semakin meningkat
- Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

d. Ancaman (Threats)

- Keterbatasan wewenang Pemerintah Daerah
- Kurangnya Koordinasi dalam menyusun Program
- Perkembangan globalisasi, Iptek, arus transformasi dan Komunikasi sangat pesat.
- Belum dilaksanakannya tata kelola layanan informasi yang efektif
- Semakin banyaknya organisasi masyarakat yang bermunculan
- Masih rendahnya komitmen pengelolaan sumber daya Komunikasi dan informasi

5. Isu Isu Strategis dalam Perumusan Program / Kegiatan**1. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah perkotaan dicirikan dengan lebih baiknya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan semakin tinggi. dengan kondisi tersebut, maka tingkat kedewasaan dan tuntutan masyarakat terhadap informasi semakin besar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan kota / Kabupaten .

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan

kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan e-government

Kabupaten Majalengka mempunyai posisi yang strategis, karena secara geografis terletak pada wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya. Saat ini warga Kabupaten Majalengka telah memasuki budaya perkotaan yang dicirikan dengan tingkat pendidikan yang baik, daya kritis yang tinggi, mobilitas yang tinggi, membutuhkan kualitas pelayanan yang baik, efisiensi dan tidak menyukai sikap birokrasi yang lamban.

Kondisi tersebut diatas harus mampu dijawab dengan postur, profil dan kinerja yang profesional dari aparatur Pemerintah Kabupaten Majalengka. Aparatur pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan pimpinan daerah menjadi pimpinan dan bawahan diseluruh lembaga, dinas, kantor dan organisasi perangkat daerah yang ada.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, maka PNS akan atau sedang menduduki posisi jabatan struktural harus dapat berperan aktif menjalankan fungsi birokrasi yang di amanahkan, sesuai dengan peraturan peundangan yang berlaku.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi

- kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - b. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan

- c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - b. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
5. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Majalengka terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;
 1. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka;
 2. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
 3. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
 4. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
 5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Jawa Barat Tahun 2009-2029;
2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka;
3. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
4. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
5. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
6. Hasil-hasil dialog;
7. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;
8. Rencana Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati;
9. Rencana Pembangunan Jalan TOL CISUMDAWU dan TOL CIKAPALI;
10. Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Cirebon.

Pertimbangan rencana baru yang akan berkaitan dengan Struktur ruang adalah:

- a. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Majalengka.
- b. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Majalengka
- c. Pembangunan Jalan Lingkar Kadipaten
- d. Pembangunan Jalan tembus Majalengka – Lemahsugih.
- e. Pengembangan Luas Ibu Kota Kabupaten Majalengka (Kec. Majalengka, Cigasong, dan Panyingkiran)
- f. Pengembangan pemanfaatan Waduk Jati Gede.
- g. Pengembangan Kawitwangi (Kawasan Wisata Sindangwangi).
- h. Pengembangan wisata situs Prabu Siliwangi.
- i. Pengaturan tentang kebencanaan.

2. Penentuan Terhadap Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Majalengka yang berada di wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial,

budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi; Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

➤ **Keterbukaan Informasi Publik**

Informasi Publik memiliki makna: segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan /instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain

diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

➤ **Komitmen terhadap e-development**

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Majalengka memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian

terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan RKPD. RKPD perubahan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD 2019-2023 (revisi) dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan anggaran tahun 2023 dan dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam ataupun mengukur Kinerja yang sudah tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Komunikasi dan Komunikasi Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang Komunikasi informatika Statistik sektoral dan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka **Pada Tabel 3 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)** ini, diperlukan:

- a. Perbaiki indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;

- b. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- c. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kab/Kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika .

Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;
3. dan Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam bentuk seperti di bawah ini : Majalengka **Pada Tabel 4 (Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**



BAB 3

TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Karakter dan kebutuhan daerah di evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat / Daerah. bagaimanapun, koordinasi dan kerja sama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat seyogyanya menjalin kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerja sama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Majalengka dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government*

antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;

- 5. Penyelarasan data Statistik Sektoral;
- 6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- 7. Pengelolaan layanan Informasi Publik dengan terintegrasinya SP4-N Lapor dengan Kementerian PAN –RB

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

TABEL . 2.3.				
KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA PD TERHADAP SASARAN RENSTRA PD / PROVINSI DAN RENSTRA K/L				
NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA PD	SASARAN PADA RENSTRA PD / PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA K/ L
1	2	3	4	5
1	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel,bersih dan Akuntabel serta pelayanan Publik yang Prima	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan berbasis e-goverment	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Sda	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Diskominfo	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik
	Jumlah OPD yang Meningkatkan Nilai IPS			
3	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Sda	Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Persandiaan pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Keamanan Informasi Publik
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Sda	Meningkatnya jumlah data yang handal dapat dipertanggungjawab abkan/	Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Kabupaten Majalengka



BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 berdasarkan hasil input sistem RKPD online (<http://sipd.kemendagri.ri>.pada tahapan Finalisasi Rancangan Akhir RKPD, adalah sebagai berikut :



BAB 5 PENUTUP



Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra serta perubahan monent klatur penyusunan Renstra tahun 2023 – 2026 berdasarkan Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020,perubahan Permengari Nomor 050 -3780 tahun 2020 dan Perubahan Permendagri Nomor 050-8988 Tahun 2021, tetap mengacu terhadap tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui pemetaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Perubahan tahun Anggaran 2024

Dengan adanya Rencana Kerja perubahan tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama PD yang membidangi fungsi lain

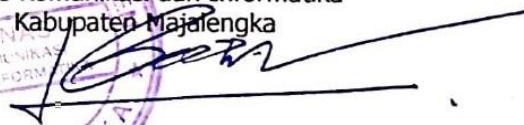
Pada penyusunan perubahan RENJA Tahun 2024, ini telah dilakukan upaya yang bersifat *Planing bottom up Sistem*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka berupaya mengakomodir seluruh ajuan atau masukan rencana pembangunan yang tersampaikan melalui Forum Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah Bidang Sarana Insfrastruktur,diiharapkan upaya tersebut dapat mendorong dan

mewujudkan RENJA yang representatif dalam rangka menunjang tercapainya target tahunan yang tertuang dalam RENSTRA PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Perwujudan RENJA yang representatif hendaknya ditindaklanjuti dengan konsistensi pada proses eksekusi program dan kegiatan, Konsistensi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh prioritas program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai target, sasaran dan indikator kinerja, hal ini perubahan eksternal yang cukup berpengaruh terhadap proses realisasi program dan kegiatan hendaknya telah terantisipasi, sehingga pengaruh tersebut tidak terlalu mengganggu terhadap kelancaran realisasi program dan kegiatan. Dalam hal ini diperlukan *political will* dari para pemangku kepentingan dan Kebijakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perencanaan dan upaya penanganannya terhadap perencanaan yang akan dilaksanakan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Majalengka Tahun 2024, agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menjadi tolok ukur kinerja dinas di masa yang akan datang.

Majalengka , Agustus 2024

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka

H. GATOT SULAEMAN, AP,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 1760528 199412 1 001

A blue folder icon with a white label in the center. The folder has a tab on the right side and a small circular handle on the left side.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL 2 (TC. 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGE T INDIKA TOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TH KE							REALISASI DAERAH TH KE							RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	7	8	9	10			11	12	13	14	15			16	17	18	19	20			21	
	DATA PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH																										
	Urusan Wajib Pemerintah Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar																										
15.1	Capaian Pelaksanaan Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika			(IKD)	SPBE																						
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Unit				17	20	23	59	59	59	59	17	20	22	57	57	57	57	100	100	96	97	100	100	100	
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase				57,81	59,3	65,28	74,75	74,75	74,75	74,75	57,81	59,3	65,28	74,75	74,75	74,75	74,75		100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai website	Persentase				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Persentase				39,18	37,77	37,89	37,95	37,95	37,95	37,95	39,18	37,77	37,89	37,95	37,95	37,95	37,95		100	100	100	100	100	100	
5	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Jumlah				62	65	66	66	67	67	67	62	65	66	66	67	67	67		100	100	100	100	100	100	
6	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Jumlah				46	50	50	51	60	62	65	46	50	50	51	60	62	65		100	100	100	100	100	100	
15.2	Jumlah Tower Telekomunikasi	Unit		(IKD)																							
1	Telkomsel	Unit				63	63	62	62	50	50	17	63	63	62	62	50	50	17	100	100	100	100	100	100	100	
2	TBG	Unit				55	55	66	78	78	78	83	55	55	66	78	78	78	83	100	100	100	100	100	100	100	
3	Protelindo	Unit				42	42	48	57	57	57	59	42	42	48	57	57	57	59	100	100	100	100	100	100	100	
4	XL	Unit				17	17	17	5	4	4	2	17	17	17	5	3	3	2	100	100	100	100	75	75	100	

1	Jumlah Seluruh Dataset yang tersedia	Jumlah Data				208	143	103	148			59	208	143	103	148			59	100	100	100	100			100
2	Jumlah Dataset sektor Pendidikan	Jumlah Data				4	9	12	10			6	4	9	12	10			6	100	100	100	100			100
3	Jumlah Dataset sektor Kesehatan	Jumlah Data				24	18	9	8				24	18	9	8				100	100	100	100			
4	Jumlah Dataset sektor Pertanian	Jumlah Data				9	5	3	3				9	5	3	3				100	100	100	100			
5	Jumlah Dataset sektor Ekonomi dan Keuangan	Jumlah Data				19	13	7	18			4	19	13	7	18			4	100	100	100	100			100
6	Jumlah Dataset sektor Kependudukan	Jumlah Data				27	6	8	23			9	27	6	8	23			9	100	100	100	100			100
7	Jumlah Dataset sektor Pariwisata	Jumlah Data				7	3	6	9				7	3	6	9					100	100	100			
8	Jumlah Dataset sektor Sosial	Jumlah Data				27	34	37	47			30	27	34	37	47			30	100	100	100	100			100
9	Jumlah Dataset sektor Infrastruktur dan Pemerintahan	Jumlah Data				91	55	21	30			10	91	55	21	30			10	100	100	100	100			100
10	Jumlah Dataset sektor Lainnya (sebutkan)		10																							
15.10	Data Persandian			(IKD)	Indeks KAMI)																					
1	Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah				0	0	1	2			19	0	0	1	2			19			100	100			100
2	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Persentase				na	na	1,85	3,70			35,19	na	na	1,85	3,70			35,19			100	100			100
3	Jumlah Jenis Informasi yang Wajib Diamankan Dengan Persandian Sesuai Peraturan Perundang Undangan	Jumlah				0	0	1	2			19	0	0	1	2			19			100	100			100

(TABEL 29)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	14
1 Program Pelayanan Administrasi Perkatoran	1.420.632.850	1.551.704.550	353.130.000				1.147.205.088	1.157.172.801	332.279.828				1,24	0,81	0,94				3.090.047.400	1.871.854.325
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana	38.019.500	172.500.000					37.895.860	148.948.000					1,00	3,92					124.269.500	112.369.860
3 Program Peningkatan			662.500.000						304.575.000						45,97				662.500.000	304.575.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian	75.000.000	19.762.500					70.300.000	11.152.500					1,07	0,15					84.881.250	75.876.250
5 Program Sinergitas Perencanaan Daerah		9.168.750						3.477.500						37,93					9.168.750	3.477.500
6 Program Pengembangan Komunikasi dan	2.439.710.750	1.362.590.450					2.109.458.000	789.685.819					1,16	0,32					3.121.005.975	2.504.300.910
7 Program Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika	194.550.000	40.300.000					152.449.000						1,28						214.700.000	152.449.000
8 Program Pengembangan Data/ Informasi	379.550.000	381.450.000					375.256.000	143.457.500					1,01	0,38					570.275.000	446.984.750
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik			927.459.000						891.626.440						96,14				927.459.000	891.626.440
10 Program Pembangunan Sistem Sistem Kinerja			1.054.988.000						1.027.054.470						97,35				1.054.988.000	1.027.054.470

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
1	3		4				6	7	8				10	11	12				13	14
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota				812.100.000	4.702.739.115	5.393.998.809				771.565.546	4.695.610.317	#####				95,01	99,85	96,66	0	812.100.000
2 Program Informasi dan Komunikasi Publik				1.546.740.000	888.591.160	517.950.000				#####	743.200.000	516.829.100				97,83	83,64	99,78	0	1.546.740.000
3 Program Aplikasi dan Informatika					749.502.800	643.727.000					744.401.480	618.805.500					99,32	96,13	0	0
4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				165.840.000	113.150.000	106.620.000				161.040.000	111.100.000	105.170.000				97,11	98,19	98,64		165.840.000
5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					140.550.000	51.900.000					139.345.000	50.400.000					99,14	97,11		0

TABEL . 4 (TABEL T-C 31)
RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN MAJALENGKA

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Urusan/urussan bidang/urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (000)	Urusan/urussan bidang/urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana (000)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Penenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	6.340.364	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Penenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	6.428.116	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Keselarasn Renstra dan Renja	90 ≤	31.475	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Keselarasn Renstra dan Renja	90 ≤	38.500	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.725	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000	
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 Dokumen	10.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000	
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Kali	6.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kali	7.500	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	10.250	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tesedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	11.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	01	2.01.	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
2	16	01	2.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Kali	6.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kali	7.500	
2	16	01	2.01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	90 ≤	5.124.112	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	90 ≤	5.121.048	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.108.548	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.108.548	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Jenis	8.364	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Jenis	5.000	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	3 Jenis	7.200	Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwualan Perangkat Daerah	3 Jenis	7.500	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	78,50%	17.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	78,50%	45.000	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	70 Buah	17.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	70 Buah	45.000	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%	445.660	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%	418.401	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	30 Jenis	25.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	30 Jenis	25.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kantor	20 Jenis	107.110	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kantor	20 Jenis	51.174	
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	20 Jenis	37.403	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	20 Jenis	35.000	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Makanan dan Minuman	4 Jenis	70.940	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Makanan dan Minuman	4 Jenis	90.000	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	22.980	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	35.000	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Jenis	82.227	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Jenis	82.227	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	100.000	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran	75%	27.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran	75%	75.000	
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis		
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	10 Jenis	27.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	10 Jenis	75.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		100%	619.400				100%	646.000	
	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	12 Bulan	531.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	12 Bulan	531.000	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 Bulan	88.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 Bulan	115.000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	100%	74.617	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	100%	84.167	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	3 Jenis	11.712	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	3 Jenis	11.712	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12 Bulan	25.450	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12 Bulan	35.000	
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	37.455	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	37.455	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	687.600	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	637.247	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Majalengka		Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	25 Jenis	687.600	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Majalengka		Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	25 Jenis	637.247	
	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Data Aplikasi Analis Media Masa dan Media Sosial	1 Aplikasi		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Data Aplikasi Analis Media Masa dan Media Sosial	1 Aplikasi		
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Informasi Publik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Informasi Pemerintahan Daerah ,Info Grafik,Audio Visual, Berita Daerah, dan Audio	4 Jenis Media	30.000	Pengelolaan Media Informasi Publik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Informasi Pemerintahan Daerah ,Info Grafik,Audio Visual, Berita Daerah, dan Audio	4 Jenis Media	90.000	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jenis Media Cetak ,Elektronik dan Publikasi	10 Jenis Kegiatan	75.300	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jenis Media Cetak ,Elektronik dan Publikasi	10 Jenis Kegiatan	75.300	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jenis Media Cetak ,Elektronik dan Publikasi	3 Jenis	365.900	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jenis Media Cetak ,Elektronik dan Publikasi	3 Jenis	300.947	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Kegiatan Work Shop, Pendampingan, Awards, Fasilitas Legilitas Kelembagaan	4 Jenis Kegiatan	124.900	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Kegiatan Work Shop, Pendampingan, Awards, Fasilitas Legilitas Kelembagaan	4 Jenis Kegiatan	125.000	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Publikasi Media Informasi Publikasi, Jumpa Pers ,Layanan Media	4 Jenis Kegiatan	91.500	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Publikasi Media Informasi Publikasi, Jumpa Pers ,Layanan Media	4 Jenis Kegiatan	46.000	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75%	15.854.086	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75%	30.821.350	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka		Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	24 Kegiatan 30 Jenis	220.700	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka		Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	24 Kegiatan 30 Jenis	215.000	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Pembangunan dan Pengembangan Data Centre Pemerintah Daerah , Desa Digital, Wifi Desa	9 Kegiatan	220.700	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Pembangunan dan Pengembangan Data Centre Pemerintah Daerah , Desa Digital, Wifi Desa	9 Kegiatan	215.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka		Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi	15 Kegiatan 30 Jenis	15.633.386	Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka		Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi	15 Kegiatan 30 Jenis	30.606.350	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Goverment dalam Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah jaringan Man (Metropolitan Area Network) OPD	3 Kegiatan	10.299.981	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Goverment dalam Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah jaringan Man (Metropolitan Area Network) OPD	3 Kegiatan	300.000	
2	16	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Pengadaan Perangkat Kapasistas Server OPD	3 Kegiatan 15 Jenis	81.350	Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Pengadaan Perangkat Kapasistas Server OPD	3 Kegiatan 15 Jenis	81.350	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Akses Jaringan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten	3 Kegiatan 15 Jenis	100.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Akses Jaringan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten	3 Kegiatan 15 Jenis	100.000	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Akses Jaringan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten	4 Kegiatan	105.180	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Akses Jaringan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten	4 Kegiatan	75.000	

	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Majalengka Cerdas dab Kota Cerdas	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah pengadaan perangkat media informasi dan komunikasi di OPD dan Desa/kelurahan dan Publik	1 Kegiatan	5.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Majalengka Cerdas dab Kota Cerdas	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah pengadaan perangkat media informasi dan komunikasi di OPD dan Desa/kelurahan dan Publik	1 Kegiatan	30.000.000	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Bintelk dan sosialisasi TIK	2 Kegiatan	24.975	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Bintelk dan sosialisasi TIK	2 Kegiatan	25.000	
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Indikator Evaluasi SPBE Perangkat Daerah	37 Indikator	21.900	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Indikator Evaluasi SPBE Perangkat Daerah	37 Indikator	25.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Dokumen Meta Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	70.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Dokumen Meta Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	70.000	
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Pengadaan Infrastruktur Open Data	1 Unit	60.000	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Pengadaan Infrastruktur Open Data	1 Unit	60.000	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat Keamanan Informasi yang diselenggarakan secara Elektronik	75%	284.880	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			75%	284.880	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi	26 Dokumen	210.030	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi	26 Dokumen	284.880	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Data dan Informasi yang terakses secara aman pada Jaringan Aplikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	70.255	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Data dan Informasi yang terakses secara aman pada Jaringan Aplikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	70.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Dokumen keamanan informasi	1 Dokumen	40.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Dokumen keamanan informasi	1 Dokumen	50.000	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Data dan Informasi yang terakses secara aman pada Jaringan Aplikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	35.100	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah Data dan Informasi yang terakses secara aman pada Jaringan Aplikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	40.000	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah data informasi yang terakses secara aman pada jaringan aplikasi pemerintah daerah	12 Bulan	64.675	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah data informasi yang terakses secara aman pada jaringan aplikasi pemerintah daerah	12 Bulan	60.000	
	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi	12 Bulan	74.850	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi	12 Bulan	75.000	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah data informasi yang terakses secara aman pada jaringan aplikasi pemerintah daerah	12 Bulan	74.850	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	Jumlah data informasi yang terakses secara aman pada jaringan aplikasi pemerintah daerah	12 Bulan	75.000	
JUMLAH									23.416.930	JUMLAH				38.421.593	

Tabel. 4 (Tabel TC- 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemegang Kepentingan Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Majalengka

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi dan Komunikasi				
1	Pengadaan Peralatan Komputer,	Desa Jatimulya Kec. Kasokandel Majalengka	Jumlah 10 Unit Perangkat Wifi Desa	5.000.000,00	Tidak Direalisasikan
2	Pengadaan Wifi Desa	Kecamatan Sumberjaya	Jumlah 1 Unit Perangkat Wifi Desa	7.500.000,00	Direalisasikan

TABEL . 4 (TABEL T-C 33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

Kode					Urusan/urusan bidang/urusan pemerintahan daerah dan program /kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	16				Program Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten /Kota Bidang Komunikasi dan Informatika								
					Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika								
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		100%	5.242.989.600				7.080.126.621
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselarasan Renstra dan Renja		90 ≤	50.281.600			90 ≤	72.112.500
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	2 Dokumen	15.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.250.000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	1 Dokumen	12.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Buku / Dokumen RKA,RKPA	1 Dokumen	13.800.000
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	1 Dokumen	7.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.625.000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	1 Dokumen	1.281.600	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKP	1 Dokumen	5.125.000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 Dokumen		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.050.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	01	2.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	2 Laporan	7.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.475.000
2	16	01	2.01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 Laporan	8.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.787.500
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah		90 ≤	4.206.467.000			90 ≤	5.377.258.090
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 1 Orang / 14 Bulan	4.206.467.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3 1 Orang / 14 Bulan	5.359.778.090
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	2 Laporan		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.200.000
2	16	01	2.02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 Laporan		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	8.280.000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah		78,50%	0			78,50%	76.250.000
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 Paket		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	76.250.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah		100%	279.985.000			100%	526.896.031
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	2 Paket	25.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	57.500.000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	4 Paket	80.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	123.176.581
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 Paket	9.985.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	43.013.450
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	4 Paket	40.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Tersedianya Makanan dan Minuman	4 Paket	81.581.000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 Jenis		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	31.625.000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	2 Dokumen	50.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	75.000.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	200 Laporan	75.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	200 Laporan	115.000.000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran		75%	40.000.000			75%	143.750.000
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum			(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	5 Unit	25.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	57.500.000
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	5 Unit	15.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	86.250.000

(1)					(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		100%	636.456.000			100%	772.310.000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	12 Laporan	531.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	670.650.000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	12 Laporan	105.456.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum (THL 4 X 13)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101.660.000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah		100%	29.800.000			100%	111.550.000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	3 Unit	4.800.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	13.800.000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	5 Unit	25.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	46.000.000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kel. Simpeureum	2 Unit		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 Unit	51.750.000
					Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	IKU	Indeks Keterbukaan Informasi Publik						
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program		100%	576.820.000			100%	1.093.135.000
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Majalengka	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah		15 Dokumen	576.820.000			15 Dokumen	1.093.135.000
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	2 Dokumen		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	115.000.000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Informasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	3 Dokumen	175.456.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	258.000.000

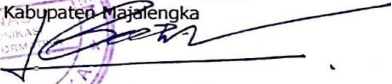
(1)					(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	2 Dokumen	126.364.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum (THL 1 x 13)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	109.250.000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	3 Layanan		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum (THL 5 x 13)	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	450.000.000
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	2 Dokumen	75.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	143.635.000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	3 Dokumen	200.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	17.250.000
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		100%	638.915.000			100%	7.762.500.000
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah		36 Unit	295.451.000			36 Unit	517.500.000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	36 Unit, 3 Jenis	295.451.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum (THL 4 x 13)	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	36 Unit, 3 Jenis	517.500.000
						BUKAN IKU							
2	16	03	2.02		Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi		11 Dokumen	343.464.000			11 Dokumen	7.245.000.000
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Dokumen	270.456.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum (THL 4 x 13)	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	517.500.000
2	16	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Majalengka semua OPD	2 Unit	48.672.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum (Tenaga Ahli 2 x 12 x 2 Juta)	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	115.000.000

(1)					(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Majalengka semua OPD	2 Unit	24.336.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum (Tenaga Ahli 1 x 12x 2 Juta)	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	172.500.000
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	3 Layanan		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Layanan	575.000.000
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Majalengka Cerdas dab Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Dokumen		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum / Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	5.750.000.000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1Dokumen		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1Dokumen	57.500.000
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Dokumen		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	57.500.000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	140.999.900			100%	603.000.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik			140.999.900				603.000.000
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	4 Dokumen	49.500.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum (Tenaga Ahli 1 x 12x 2 Juta)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	172.500.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	54 orang	44.999.900	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	54 orang	86.250.000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Dokumen	22.500.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum (Tenaga Ahli 1 x 12x 2 Juta)	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	206.250.000
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	2 Unit	24.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Infrastruktur Statistik	2Unit	138.000.000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN (BUKAN IKU)								
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi yang diselenggarakan secara Elektronik		100%	80.000.000			100%	402.678.250
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Layanan Keamanan Informasi Publik yang Terkoneksi		57 Dokumen	80.000.000			57 Dokumen	316.600.750
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	1 Dokumen		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	80.793.250
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	4 Laporan		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	69.000.000
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	4 Laporan		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum (Tenaga Ahli 1 x 4 x 2 Juta)	Jumlah Data dan Informasi yang terakses secara aman pada Jaringan Aplikasi Pemerintah Daerah	4 Laporan	80.730.000
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	54 Perangkat Daerah	80.000.000	(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 Perangkat Daerah	86.077.500

(1)					(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Layanan Informasi Publik yang Terkoneksi		54 Perangkat Daerah	0			54 Perangkat Daerah	86.077.500
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Majalengka semua Kecamatan semua kelurahan	54 Perangkat Daerah		(Dana Umum) Tranfer Umum Alokasi Umum	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	54 Perangkat Daerah	86.077.500
JUMLAH									6.679.724.500				16.941.439.871

Majalengka, Mei 2023

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka

H. GATOT SULAEMAN, AP.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 1760528 199412 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. MAJALENGKA TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								6.655.724.500,00	6.790.027.708,00	8.381.000.252,00	1.725.275.752,00						8.357.045.750,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.655.724.500,00	6.790.027.708,00	8.381.000.252,00	1.725.275.752,00							8.357.045.750,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							6.433.724.600,00	6.568.027.808,00	8.159.000.352,00	1.725.275.752,00							8.013.045.750,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran				4 Dokumen	4 Dokumen	5.217.989.600,00	5.352.335.308,00	5.263.307.852,00	282.477.400,00							5.500.467.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.281.600,00	50.424.100,00	50.424.100,00	142.500,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Keselaran Renstra dan Renja		54.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.281.600,00	1.424.100,00	1.424.100,00	142.500,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	NON URUSAN							6.655.724.500,00	6.790.027.708,00	8.381.000.252,00	1.725.275.752,00							8.357.045.750,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.433.724.600,00	6.568.027.808,00	8.159.000.352,00	1.725.275.752,00							8.013.045.750,00	
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	-	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.655.724.500,00	6.790.027.708,00	8.381.000.252,00	1.725.275.752,00							8.357.045.750,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							6.433.724.600,00	6.568.027.808,00	8.159.000.352,00	1.725.275.752,00							8.013.045.750,00	
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	4.206.467.000,00	4.340.770.208,00	4.251.742.752,00	45.275.752,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah		4.306.467.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	4.206.467.000,00	4.340.770.208,00	4.251.742.752,00	45.275.752,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.306.467.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	279.985.000,00	279.885.000,00	279.885.000,00	-100.000,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah		260.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.985.000,00	9.985.000,00	9.985.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	40.000.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00	-100.000,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	636.456.000,00	636.456.000,00	636.456.000,00	0,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah		750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	531.000.000,00	531.000.000,00	531.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	105.456.000,00	105.456.000,00	105.456.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah				6 Unit	6 Unit	29.800.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelayakan Aset Perangkat Daerah		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah layanan informasi publik yang disediakan pemerintah daerah Capaian masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				100 145 Persen buah	145 100 buah Persen	576.820.000,00	576.777.500,00	1.956.777.500,00	1.110.302.750,00							1.687.122.750,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	576.820.000,00	576.777.500,00	1.956.777.500,00	1.379.957.500,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik		1.687.122.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	175.456.000,00	187.238.500,00	187.238.500,00	11.782.500,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	126.364.000,00	114.576.500,00	114.576.500,00	-11.787.500,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Simpeureum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			26.364.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	199.962.500,00	1.579.962.500,00	1.379.962.500,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Majalengka Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.585.758.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Capaian Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah sarana infrastruktur layanan publik				100 6 Persen Lokasi	100 6 Persen Lokasi	638.915.000,00	638.915.000,00	938.915.000,00	186.541.000,00							825.456.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Infomasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah				3 Jenis	3 Jenis	295.451.000,00	295.451.000,00	245.451.000,00	-50.000.000,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				3 Unit	3 Unit	295.451.000,00	295.451.000,00	245.451.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Informasi Publik yang Terkoneksi				3 Dokumen	3 Dokumen	343.464.000,00	343.464.000,00	693.464.000,00	350.000.000,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		475.456.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	270.456.000,00	270.456.000,00	620.456.000,00	350.000.000,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			270.456.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	2 Unit	48.672.000,00	48.672.000,00	48.672.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	24.336.000,00	24.336.000,00	24.336.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa	-	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							140.999.900,00	140.999.900,00	140.999.900,00	0,00							249.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Peyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah				100 Persen	100 Persen	140.999.900,00	140.999.900,00	140.999.900,00	108.000.100,00							249.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihasilkan				4 Dokumen	4 Dokumen	140.999.900,00	140.999.900,00	140.999.900,00	0,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Data Statistik Sektoral		249.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			74.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
			<i>Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>				1 Orang	1 Orang	44.999.900,00	44.999.900,00	44.999.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur																		
			<i>Jumlah Infrastruktur Statistik</i>				1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00							95.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kemanan Informasi yang Diselenggarakan Secara Elektronik				100 Persen	100 Persen	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	14.000.000,00							95.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana Layanan Kemanan Informasi Publik yang Terkoneksi</i>				5 OPD	5 OPD	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00			-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianyan Sarana Layanan Keamanan Informasi Publik yang Terkoneksi		95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Cigasong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		J U M L A H							3.434.966.896.764,00	3.049.947.022.404,00	3.218.712.479.805,00	-216.254.416.959,00							2.413.696.373.896,00	